

Tantangan dan Perwujudan *Gender Equality* Sebagai Realitas Sosial serta Implikasinya dalam Pembangunan di Indonesia

Indiani Eka Saputri¹, Hapri Novriza Setya Dhewantoro², Primanisa Inayati Azizah³, Prihma Sinta Utami⁴

[✉happrisetia@uny.ac.id](mailto:happrisetia@uny.ac.id)

^{1,2,3}Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

⁴Universitas Insan Budi Utomo, Malang, Indonesia.

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i1.3997>

Copyright © 2024, *Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*. All right reserved

How to Cite

Saputri, I. E., Dhewantoro, H. N. S., Azizah, P. I., Utami, P. S. (2024). Tantangan dan Perwujudan *Gender Equality* Sebagai Realitas Sosial serta Implikasinya dalam Pembangunan di Indonesia . *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6 (01), 14-25.

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i1.3997>

ABSTRAK

Kesetaraan gender termasuk ke dalam tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan nasional jangka panjang maupun menengah. Oleh karena itu baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan dan akses yang sama sebagai agen dari pembangunan. Namun, dalam realitas masyarakat Indonesia perbedaan gender ini nyatanya masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Metode dalam pengumpulan data dan informasi yaitu dengan bantuan buku, catatan dari jurnal, dokumen, atau materi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data tersebut untuk diambil sebuah kesimpulan. Sifat dari penelitian studi literatur ini yaitu analisis deskriptif dengan menguraikan data yang diperoleh secara teratur. Kemudian, memberikan penjelasan serta pemahaman kepada pembaca agar mudah dipahami (Pusparani, 2021). Hasil dari penelitian ini yaitu proses dari perwujudan kesetaraan gender di Indonesia sudah terlihat di beberapa sektor seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik tetapi belum maksimal. Hal ini karena adanya tantangan dalam proses tersebut seperti kuatnya budaya patriarki, pelaksanaan undang-undang yang tidak maksimal, kesenjangan akses pendidikan dan kesempatan kerja yang belum merata, serta masih banyak lagi. Oleh karena itu Indonesia harus mampu menyikapi tantangan tersebut dengan baik di mana tercapainya kesetaraan gender sebagai syarat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat di masyarakat harus menjadi prioritas dalam inisiatif pembangunan.

KATA KUNCI

Tantangan, kesetaraan gender, pembangunan

PENDAHULUAN

Isu mengenai *gender equality* atau kesetaraan gender masih menjadi topik yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal itu karena perbedaan antara laki-laki dengan perempuan telah terbentuk dalam masyarakat dan terkonstruksi berdasarkan aspek sosiokultural sehingga pelabelan tersebut muncul sebagai pembeda di dalam konsep gender (Rosyidah & Nurwati, 2019). Akan tetapi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2022, Indonesia mencapai angka sebesar 0,459 poin di mana turun sebesar 0,006 poin daripada tahun 2021. Turunnya indeks ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan (BPS, 2023). Disisi lain, dalam laporan Indeks Kesenjangan Gender Global (*Global Gender Gap Report*) pada tahun 2023 mengatakan bahwasannya skor Indonesia sebesar 0,697 poin. Dengan kata lain, poin tersebut sama dengan tahun sebelumnya, yang membedakan hanyalah peringkat Indonesia yang meningkat sebesar 5 peringkat dari tahun 2022 menjadi urutan ke 87 dari 146 negara (World Economic Forum, 2023). Walaupun dengan skor tersebut sudah terdapat perbaikan, tetapi hasilnya masih perlu untuk ditingkatkan kembali.

Kesetaraan gender termasuk ke dalam sasaran pencapaian tujuan dari pembangunan nasional dalam jangka panjang maupun menengah. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) sesuai yang telah ditetapkan oleh PBB. Pada era revolusi industri 4.0 ini banyaknya peluang yang ada harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dikarenakan era ini dipenuhi dengan kecerdasan buatan, inovasi, sumber informasi yang luas dan mudah diakses, serta perubahan yang sangat cepat dan mampu berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (Suarmini N.W. et al., 2018). Oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama sebagai agen dari pembangunan. Namun, pada realitas masyarakat Indonesia perbedaan gender ini nyatanya masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sudirman & Susilawaty (2022) bahwa pengakuan terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi isu global yang dapat dilihat dari kesenjangan akses dan penguasaan teknologi informasi atau komunikasi yang masih cukup besar.

Pada masyarakat Indonesia yang lain, adanya perbedaan gender yang disebabkan karena pembatasan sosial dan sistem patriarki ini masih ada pada sebagian besar keluarga (Sudirman & Susilawaty, 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perwujudan kesetaraan gender karena keluarga sebagai tempat pendidikan dan sosialisasi pertama berarti belum bisa menerapkan fungsinya dengan baik. Menurut Aula (2023), permasalahan kesetaraan gender ini meliputi diskriminasi gender, stereotip gender, kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan upah, akses yang tidak merata dalam pendidikan, pelayanan dan kesehatan, rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Isu kesetaraan ini juga tidak hanya menimpa pada perempuan saja melainkan laki-laki juga dapat mengalaminya.

Realitas nyata terkait permasalahan ketimpangan di Indonesia terlihat pada kesenjangan upah yang terjadi. Berdasarkan data BPS tentang upah rata-rata per jam pekerja menurut jenis kelamin pada tahun 2022 menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sebesar Rp18.261 meningkat dari tahun 2021 yaitu Rp18.210. Sedangkan untuk upah perempuan berada di angka Rp16.056 menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp17.848 (BPS, 2023). Sedangkan dalam bidang politik, berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019, partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif Nasional yaitu DPR-RI berada di angka 20,8% dengan kata lain hanya 120 anggota perempuan dari 575 jumlah anggota DPR-RI. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan masih berada di bawah syarat 30% jumlah calon legislatif perempuan saat partai mendaftar sebagai peserta pemilu (MPR, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum dilaksanakan dengan baik sehingga proses perwujudan kesetaraan gender menjadi terhambat.

Kesetaraan gender juga tidak sebatas pada hak yang dimiliki oleh manusia melainkan sebagai dasar dari terwujudnya kemakmuran dan perdamaian di dunia (Harahap, 2018). Ketika kesetaraan gender ini masih belum menemukan titik penyelesaiannya maka dapat berpotensi menjadi hambatan bagi pembangunan manusia. Oleh karena itu isu kesetaraan gender ini perlu untuk diperjuangkan agar setiap manusia dapat merasakan pembangunan secara adil dan merata serta berdampak pada kemakmuran. Belum terwujudnya kesetaraan gender secara maksimal di Indonesia dapat disimpulkan bahwa isu ini memiliki tantangan dalam proses mewujudkannya. Dengan demikian, mengetahui hal tersebut merupakan hal yang penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta implikasinya dalam pembangunan di Indonesia. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh peneliti lain sekaligus sebagai sumber acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

METODE

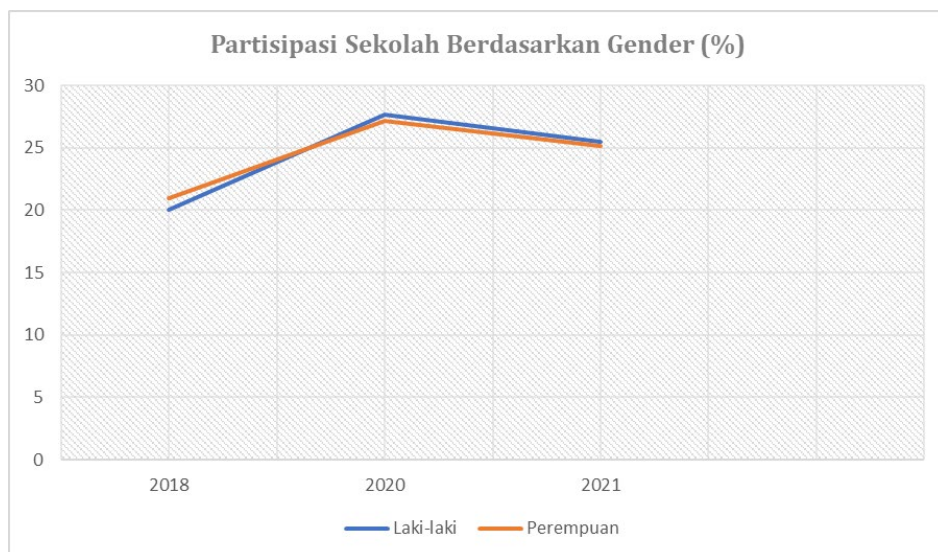
Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Metode dalam pengumpulan data dan informasi yaitu dengan bantuan buku, catatan dari jurnal, dokumen, atau materi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini (Sari & Asmendri, 2020). Penelitian pustaka dalam kajian ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap karya ilmiah seperti artikel ataupun jurnal yang membahas mengenai tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta implikasinya dalam pembangunan. Dalam penelitian menggunakan studi literatur, data diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, pendapat pakar, dan dari beberapa artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, juga dapat menggunakan karya lain yang memiliki keterkaitan dengan analisis pada

penelitian ini. Sedangkan, pengumpulan data dilakukan dengan mengutip secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, diorganisir, dikomparasikan, dan dihubungkan antara satu dengan lainnya agar tercipta koherensi atau dapat dimaknai sebagai konsep yang utuh dan sistematis.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini berfokus pada penjelasan sistematis mengenai fakta yang didapatkan pada saat penelitian dilakukan. Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data tersebut untuk diambil sebuah kesimpulan. Sifat dari penelitian studi literatur ini yaitu analisis deskriptif dengan menguraikan data yang diperoleh secara teratur. Kemudian, memberikan penjelasan serta pemahaman kepada pembaca agar mudah dipahami (Pusparani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender merupakan suatu kata yang identik sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Selain itu, istilah gender ini lebih mengacu pada kondisi biologis dari seseorang. Konsep perbedaan antara laki-laki yang wajib untuk mencari nafkah sedangkan perempuan mengurus rumah menjadi salah satu sebab rendahnya rasio TPAK perempuan daripada laki – laki Indonesia yaitu dibawah angka 1 (Nuraeni dan Suryono, 2021). Kemudian, tingkat partisipasi di bidang pendidikan antara laki-laki dengan perempuan juga belum menunjukkan jumlah yang setara. Padahal seiring dengan berkembangnya zaman akan ada banyak kebutuhan tenaga kerja yang tidak hanya pandai pada *hard-skill* nya melainkan juga *softskill* nya di mana hal itu dapat diperoleh melalui pendidikan.



Sumber: <https://singkawangkota.bps.go.id/>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi sekolah kaum perempuan masih berada dibawah kaum laki-laki. Selain itu, menurut LIPI (2018) adanya stereotip bahwa teknologi berkaitan dengan maskulinitas menjadi penyebab pengembangannya diidentikan dengan laki-laki. Pada sektor pemerintah persentase peneliti dengan pakar TIK juga didominasi oleh kaum laki-laki sebesar 66,23% (Perdani dan Wicaksono, 2022). Sedangkan berdasarkan data dari SAKERNAS tahun 2019 pekerja laki-laki lulusan STEM memiliki rata-rata pendapatan lebih daripada pekerja perempuan lulusan STEM di level pendidikan apapun. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan agar perwujudan kesetaraan gender dapat lebih maksimal. Secara lebih jelas pembahasan mengenai tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta implikasinya dijelaskan sebagai berikut.

1. Tantangan Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia

Prioritas utama dalam SDGs adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Aula, 2018). Hal ini berarti negara memiliki kewajiban dalam menjamin pembangunan yang inklusif dan merata bagi masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Aula (2018) dalam penelitiannya bahwa pemberian hak bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat adat, dan orang yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadi hal yang penting untuk diberikan. Kesetaraan gender ini merupakan istilah dalam menyebut kondisi yang seimbang antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki sehingga tidak ada batasan bagi siapa saja untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bernegara. Menurut Yusalia dalam Aula (2018) mengatakan bahwa budaya patriarki yang kuat baik itu di dalam lingkungan masyarakat ataupun pemerintahan lah yang menjadi tantangan besar dan menghambat Pengarusutamaan Gender (PuG). Padahal Pengarusutamaan Gender (PuG) ini sebagai strategi pembangunan yang bertujuan mencapai kesetaraan gender melalui program, kebijakan, maupun kegiatan pemerintah yang dilakukan secara nasional (Aula, 2018).

Walaupun indeks kesetaraan gender di Indonesia berada pada level yang baik, tetapi upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender harus tetap dilakukan secara maksimal dan mampu ditingkatkan. Hal itu dapat dilakukan dengan memahami tantangan yang ada pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan kesetaraan gender. Oleh karena itu, setiap tantangan dalam proses mewujudkannya harus disikapi dengan bijak bahkan dapat diubah menjadi peluang untuk mendukung tercapainya kesetaraan gender secara maksimal. Adapun tantangan dalam perwujudan kesetaraan gender di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk modal sosial pada seseorang. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Fathy (2019) bahwa faktor

yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan modal sosial adalah kebiasaan, pendidikan, kelas sosial dan ekonomi, kedudukan (peranan aktor), dan nilai-nilai personal. Ketika modal sosial yang baik dimiliki oleh seseorang maka akan berpengaruh terhadap taraf hidup yang baik pula. Akan tetapi, adanya pembatasan dalam akses pendidikan bagi kaum perempuan pada tingkat pendidikan tertentu serta perlakuan tidak adil kepada siswa yang didasarkan pada jenis kelamin dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dalam penelitian Harahap (2018) dikatakan bahwa untuk tingkat kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia sudah cukup baik yaitu telah mencapai 98,6%. Pendidikan ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Suarmini N.W. et al., 2018). Adanya program wajib belajar yang dibuat oleh pemerintah merupakan peluang yang diperuntukkan bagi semua gender tidak terbatas pada kaum laki-laki atau perempuan saja dalam upaya memberdayakan diri sehingga semua mampu berperan strategis dalam pembangunan bangsa.

Tantangan lain yang dihadapi dalam perwujudan kesetaraan gender di bidang pendidikan yaitu berkaitan dengan era digitalisasi di mana kemampuan perempuan dalam mengakses informasi maupun menggunakan teknologi juga diperlukan. Hal senada juga disampaikan oleh Suarmini N.W et. al (2018) bahwa partisipasi perempuan di era ini tidak hanya pada tuntutan kesetaraan hak tetapi juga menyatakan fungsi dan memiliki makna dalam membangun masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perempuan harus mampu menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memerhatikan nilai luhur budaya bangsa. Sebagai bukti nyatanya, saat ini banyak dari kaum perempuan yang memiliki minat belajar di jurusan yang identik dengan laki-laki seperti industri sains, teknologi, teknik, matematika sehingga dapat membuktikan bahwa kaum perempuan juga memiliki pengaruh dan peran yang positif bagi pembangunan (Suarmini N.W et. al., 2018). Namun, berdasarkan data dari Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2022 persentase penggunaan internet antara laki-laki dengan perempuan masih terdapat kesenjangan yaitu masing-masing sebesar 60,40% dan 54,70% (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam literasi digital antara perempuan dan laki-laki masih perlu untuk ditingkatkan agar semakin mampu berdampak bagi pembangunan bangsa.

2. Dalam bidang Ketenagakerjaan

Dalam bidang ketenagakerjaan, kesetaraan gender diwujudkan dalam usaha menarik minat perempuan untuk bekerja di sektor industri. Pemerintah memberikan program yang inovatif kepada perempuan seperti program Coding Mum dan pelatihan bahasa pemrograman yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Adanya program pemberdayaan ini mampu memperbesar keterlibatan dari kaum perempuan untuk turut serta membangun bangsa (Suarmini N.W et. al., 2018). Kemudian, realitas yang

ada di masyarakat Indonesia saat ini di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini kaum perempuan memang lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan daripada kaum laki-laki tetapi kebanyakan pekerjaan tersebut ada di bidang pelayanan jasa seperti administrasi, perawat, pelayan toko, buruh pabrik, asisten rumah tangga, dan pedagang (Harahap, 2018). Padahal, hal itu terjadi karena kebutuhan yang dimiliki menuntut kaum perempuan bekerja pada sektor tersebut. Selain itu, karena lapangan kerja yang terbatas bagi perempuan menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi terwujudnya kesetaraan gender di bidang ini.

Perwujudan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan yang lain yaitu adanya regulasi terkait ketenagakerjaan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 di mana tidak disebutkan terdapat pemisahan antara laki-laki dan perempuan melainkan penamaan tenaga kerja yang mencakup keduanya (Fitriyaningsih & Faizah, 2020). Dalam undang-undang tersebut juga disampaikan bahwa kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dilakukan secara merata sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Berdasarkan hal tersebut maka pelabelan dari marginalisasi gender dapat sedikit memudar sehingga mampu mendorong terciptanya kesetaraan gender.

Walaupun sudah terdapat perwujudan dari kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, tetapi pelaksanaan yang belum maksimal menandakan bahwa terdapat tantangan dalam prosesnya. Tantangan dari perwujudan kesetaraan gender dalam bidang ini yaitu kurangnya perlindungan kerja. Menurut Pahlevi (2023) perempuan sering mengalami diskriminasi di tempat bekerjanya seperti penggajian yang tidak dilakukan secara adil, mendapat perlakuan pelecehan seksual, serta mengabaikan hak-hak pekerja. Ketika kesetaraan gender ingin diwujudkan secara maksimal, maka praktik-praktik demikian harus ditangani dengan tepat. Dengan keterlibatan perempuan yang semakin baik di berbagai sektor maka memungkinkan mengubah pemikiran masyarakat terkait peran kaum perempuan di era global (Nirmalasari & Putri, 2022).

Tantangan lain di bidang ketenagakerjaan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender terletak pada adanya kesenjangan antara tenaga kerja perempuan yang berasal dari latar belakang sosial budaya dan dari institusi (Nuraeni & Suryono, 2021). Adanya stigma dalam masyarakat yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman laki-laki yang lebih tinggi sehingga pekerja perempuan dianggap hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu merupakan kesenjangan gender yang berasal dari institusi. Sedangkan latar belakang sosial budaya ini seperti konsep patriarki yang masih menguat di beberapa daerah tertentu sehingga perempuan lebih diutamakan mengurus keluarga daripada bekerja.

3. Dalam bidang Politik

Perwujudan kesetaraan gender dalam bidang politik tidak hanya ditujukan bagi kaum laki-laki saja. Hal itu dapat dilihat dari adanya jaminan kesempatan secara luas yang diberikan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, organisasi tertentu, dan lingkungan tempat tinggal (Suarmini et al., 2018). Menurut Maharani dan Ediyono, dalam bidang politik ini partisipasi perempuan sudah mulai terlihat. Sebagai contoh perwujudan dari kesetaraan gender di bidang politik ini yaitu adanya pejabat negara yang bergender perempuan seperti Tri Rismaharini (Menteri Sosial Republik Indonesia), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Indonesia), Susi Pudjiastuti (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur). Dengan realitas tersebut meskipun laki-laki menjadi pihak yang mendominasi dalam politik tetapi adanya perempuan yang ikut terjun dalam perpolitikan Indonesia menandakan bahwa perempuan juga bisa memanfaatkan peran strategisnya demi pembangunan bangsa.

Jaminan terhadap kesetaraan gender juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan adanya jaminan tersebut yaitu agar dapat memastikan pelaksanaan dari kesetaraan gender, hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dalam partisipasinya di pemerintahan, dan pengakuan pentingnya peran dari perempuan dalam pembangunan nasional. Keterlibatan dari perempuan dalam ranah politik ini memiliki peran yang penting bagi terwujudnya kesetaraan gender. Pengalaman hidup, pola pikir, dan kepentingan yang dimiliki oleh perempuan memperkaya pemahaman dan perspektif dalam proses pengambilan keputusan dalam politik. Selain itu, perempuan dalam politik dapat menjamin kebebasan yang penuh dalam menggunakan hak dan mengembangkan potensinya (Kurnianingsih, et al., 2022).

Bidang politik dapat dikatakan sebagai tempat berkompetisi oleh calon pemimpin sebagai yang akan mengambil keputusan. Hal ini menjadi alasan mengapa politik di Indonesia lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang lebih subjektif menjadi tantangan bagi perempuan dalam mewujudkan peran yang lebih unggul dari laki-laki sehingga lebih sulit ketika hendak terjun dalam ranah publik (Harahap, 2018). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Gusmansyah (2019) juga turut mengatakan bahwa laki-laki menjadi pihak yang mendominasi mulai dari tingkat keluarga hingga pada politik formal. Menurut Harahap (2018) tantangan yang harus diterima oleh kaum perempuan ketika terjun dalam sektor politik meliputi akses yang terbatas dalam memperoleh pendidikan, sumber daya dan keuangan yang kurang, tingkat kekerasan yang tinggi, pelecehan gender, intimidasi, ancaman keselamatan, dan kuatnya budaya patriarki. Selain itu, kurangnya dukungan dari partai politik sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pemilihan kandidat maupun pembiayaan kampanye turut menjadi tantangan lain bagi terwujudnya kesetaraan gender. Dalam realitanya, peluang perempuan untuk

dapat diusung oleh partai sering kali dengan melihat hubungan kekerabatan dengan para elit partai sehingga kondisi tersebut memicu terhambatnya perempuan untuk ikut berpartisipasi di ranah politik (Aula, 2018). Dengan kata lain, perwujudan dari kesetaraan gender yang baik adalah ketika dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kehidupan ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan adil tanpa membandingkan jenis kelamin (Badan Pusat Statistik, 2019).

2. Implikasi Kesetaraan Gender bagi Pembangunan di Indonesia

Memprioritaskan salah satu gender misalnya laki-laki saja dalam setiap aspek kehidupan maka dapat memicu munculnya ketidakseimbangan peran antara kaum perempuan dengan laki-laki di Indonesia (Bayumi, et.al, 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut, kesetaraan gender merupakan hal pokok yang harus terus diupayakan oleh pemerintah dalam pembangunan bangsa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dan Susilawaty (2022) diperoleh hasil bahwa dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, kesetaraan gender menjadi suatu hal yang diperlukan. Sejalan dengan hal tersebut, Kangile et.al, (2021) juga turut mengatakan bahwa tercapainya kesetaraan gender mampu meningkatkan partisipasi ekonomi dan daya saing sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesetaraan gender memberikan peluang kepada semua orang tanpa melihat perbedaan dalam meningkatkan mata pencahariaannya sehingga dapat meningkatkan peluang memperoleh pendapatan. Selanjutnya, UNESCO (2019) menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan prinsip hak asasi manusia sebagai syarat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat di masyarakat. Oleh karena itu tercapainya kesetaraan gender harus menjadi prioritas dalam inisiatif pembangunan.

Pada pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan menurunnya kemiskinan dan meningkatnya pendapatan masyarakat (Arifin, 2018). Salah satu hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah gender. Perempuan yang memiliki dasar pendidikan yang baik ditambah dengan peluang bekerja di sektor formal yang besar maka dapat meningkatkan powernya dalam keluarga sehingga dapat membentuk modal sosial yang baik pada anak sebagai generasi mendatang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Padang, et.al (2019) dikatakan bahwa luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktivitas pekerja dalam kegiatan ekonomi merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Hal ini berpeluang dalam mengurangi ketidakefisienan ekonomi dan meningkatkan keterlibatan ekonomi baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, selain meningkatkan kesejahteraan juga dapat meningkatkan kesetaraan gender karena pembangunan ekonomi dengan kesetaraan gender merupakan dua hal yang memiliki hubungan kerja dua arah.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender termasuk ke dalam tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan nasional jangka panjang maupun menengah. Oleh karena itu baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan dan akses yang sama sebagai agen dari pembangunan. Namun, dalam realitas masyarakat Indonesia perbedaan gender ini nyatanya masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Adapun tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia yaitu dibagi dalam tiga bidang meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik. Disetiap bidang memiliki tantangan dan perwujudannya masing-masing. Namun, yang perlu dipahami bahwa memprioritaskan salah satu gender saja dalam setiap aspek kehidupan dapat memicu munculnya ketidakseimbangan peran antara kaum perempuan dengan laki-laki di Indonesia di mana hal itu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam meningkatkan mata pencahariaannya sehingga dapat meningkatkan peluang memperoleh pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. 2020. Kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27-42.
- Aula, M.R. 2023. Isu-Isu Gender Dalam Keterwakilan (Ketimpangan Gender) dalam Kehidupan Politik Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 190-200.
- Badan Pusat Statistika Kota Batu. 2019. Angka Partisipasi Murni. Jakarta: BPS.
- Bayumi, M.R., Jaya, R.A., & Shalihah, B.M. 2022. Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2).
- BPS. 2022. Mengakses Internet menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022. <https://rembangkab.bps.go.id/indicator/2/253/1/mengakses-internet-menurut-jenis-kelamin.html>
- BPS. 2023. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender--ikg--2022.html>
- BPS. 2023. Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Menurut Jenis Kelamin (Rupiah/Jam), 2021-2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3NCMy/upah-rata-rata-per-jam-pekerja-menurut-jenis-kelamin--rupiah-jam-.html>
- Fathy, R. 2019. Modal sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17. doi: <https://doi.org/10.22146/jps.v6il.47463>
- Fitriyaningsih, P.D.A., & Faizah, F.N. 2020. Relevansi kesetaraan gender dan peran perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia (perspektif ekonomi islam). *Jurnal Al-Maiyyah*, 13(1).
- Gusmansyah, W. 2019. Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 156-172. doi:<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>

- Gusmansyah, W. 2019. Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 156-172. doi:<https://doi.org/10.29300/hawapsga.vv1i1.2233>
- Harahap, F. 2018. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Universitas Padjadjaran*.
- Kangile, J.R., Kadigi, R.M.J., Mgeni, C.P., Munishi, B.P., Kashaigili, J., & Munishi, P.K.T. 2021. The role of coffee production and trade on gender equity and livelihood improvement in Tanzania. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810191>
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R.A., & Azizi, O.R. 2022. Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 45-55. doi:<https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.37594>
- LIPI. 2018. Gender dalam ilmu penge-tahuan dan teknologi: Perkembangan, kebijakan, & tantangannya di Indonesia (W. Hermawati, Ed.). Retrieved from <http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah1521570363.pdf>.
- Maharani, A. F. P., & Ediyono, S. Perspektif Feminisme Dalam Kesetaraan Gender di Indonesia.
- MPR. 2023. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Butuh Dukungan semua Pihak. <https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan-Partisipasi-Perempuan-dalam-Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak>
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. 2022. Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 43-53.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. 2021. Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
- Padang, D.M. 2019. Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 969-976.
- Perdani, E. W., & Wicaksono, P. 2022. Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan Tinggi Lulusan Program Studi STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics). *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 28-45.
- Pinto, M., Sales, D., & Fernández-Pascual, R. 2019. Gender perspective on information literacy: An interdisciplinary and multidimensional analysis within higher education settings. *Library and Information Science Research*, 41(4), 100979. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.100979>
- Pusparani, M. 2021. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4), 534-543.
- Rosyidah, F.N., & Nurwati, N. 2019. Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 10. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>
- Sari, M., & Asmendri, A. 2020. Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.

- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. 2022. Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): suatu rewiuw literatur sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995-1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- UNESCO. 2019. *UNESCO Priority Gender Equality Action Plan: 2014-2021, 2019 revision*. UNESDOC Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370905>
- Wold Economic Forum. 2023. Global Gender Gap Report 2023. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/in-full/benchmarking-gender-gaps-2023/?DAG=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIl76dr5WBgwMVkqlmAh36YA33EAAYASAAEgIcg_D_BwE